

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha yang bertambah pesat seiring dengan perkembangan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya persaingan yang ketat dalam dunia usaha, penyedia barang maupun jasa serta peningkatan kebutuhan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, dengan semakin berkembangnya dunia usaha maka kegiatan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan semakin kompleks, sehingga semakin sulit bagi pihak pimpinan untuk melaksanakan pengawasan atau mengkoordinir secara langsung terhadap seluruh aktivitas perusahaan.

Koperasi sebagai badan usaha didorong untuk senantiasa ikut berperan secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya agar terjadi kesenjangan sosial, sehingga bisa menjadi wadah kegiatan ekonomi rakyat yang mampu mensejahterakan kesenjangan sosial. Sesuai UU No. 25 / 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan badan hukum atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Pengendalian intern merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan

prosedur yang ada sehingga operasi perusahaan dapat berjalan lancar, aktiva perusahaan dapat terjamin keamanannya, dan kecurangan serta pemborosan dapat dicegah. Secara umum, pengendalian intern merupakan dari bagian masing-masing sistem yang telah digunakan sebagai prosedur pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian intern merupakan kumpulan dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu sama lainnya.

Koperasi Simpanan Pinjaman Syariah kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan tabungan dan simpanan berjangka, serta penyaluran dana dilakukan melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada anggotanya yang memiliki usaha mikro. Sebagai penyaluran pembiayaan yang dilakukan koperasi syariah tidak selamanya tidak ada hambatan, terkadang pembiayaan yang diberikan mengalami masalah yaitu pembiayaan macet atau tidak terbayarkan. Masalah kegagalan pembiayaan tersebut bisa disebabkan oleh faktor eksternal (pihak anggotanya) dan faktor internal (pihak koperasi). Untuk itu dalam usaha pencegahan pembiayaan bermasalah, salah satu cara yang dapat diterapkan manajemen koperasi syariah yaitu dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif untuk kegiatan operasionalnya, khususnya pada proses persetujuan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian untuk pemberian pembiayaan sebagai upaya pencegahan terjadinya kegagalan pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.

Pemberian pinjaman harus memperhatikan beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan, yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Penerapan prinsip ini diperlukan agar tidak memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Prinsip dasar ini antara lain karakter , kapasitas , modal, kondisi ekonomi, serta jaminan atau yang dikenal dengan prinsip 5C (*character, capital, capacity, condition, dan collateral*).

pengendalian intern yang memadai dalam bidang pembiayaan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh koperasi tersebut. Untuk mampu berperan sebagai pembiayaan yang tangguh dan sehat melalui usaha pemberian pembiayaannya harus mampu meningkatkan proses pemberian pembiayaan dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan pembiayaan. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan pembiayaan terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Pembiayaan yang diberikan oleh bank atau koperasi berdasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada anggotanya.

Pemberian pembiayaan kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian pembiayaan antar pemberi dengan penerima pembiayaan. Pemberian pembiayaan memiliki risiko yaitu adanya kemacetan pembiayaan. pembiayaan macet memberikan dampak kurang baik bagi negara, masyarakat, perbankan dan

koperasi indonesia. Adanya rentang waktu pengembalian mengakibatkan resiko yang besar bagi bank atau koperasi terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya pembiayaan bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari koperasi tersebut untuk memenuhi kewajiban para deposan.

Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank atau koperasi yang paling pokok. Maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap anggotanya yang mengajukan pembiayaan pinjaman serta yakin bahwa anggotanya mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan adanya suatu pengamanan pembiayaan. Tujuan pengamanan ini dalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul kemacetan pembiayaan. Oleh karna itu pihak koperasi harus meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil kemungkinan terjadinya kemacetan pembiayaan.

Banyak bank-bank atau pembiayaan yang memiliki komitmen bagi untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pembiayaan sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha kecil menengah keatas. Tidak sedikit bank-bank atau koperasi yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian pembiayaan yang telah dipinjamkan.

Masalah keamanan pembiayaan yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya resiko-resiko yang timbul daam sistem pemberian pembiayaan. Permasalahan ini bisa dihindari dengan suatu

pengendalian internal yang dapat menjunjung efektifitas sistem pemberian kredit. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil topik yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BMT WALISONGO CABANG TAMBAK LOROK”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pemberian pembiayaan pada BMT Walisongo cabang Tambak Lorok itu berjalan di koperasi tersebut?
2. Bagaimanakah efektifitas sistem pengendalian intern pemberian pembiayaan oleh koperasi dalam proses pemberian pembiayaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektifitas bagaimana sistem pengendalian intern pemberian pembiayaan yang berjalan pada koperasi tersebut.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi dalam proses pemberian pembiayaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman yang berharga terutama mengenai sistem pengendalian intern terhadap prosedur dan kebijakan pemberian pembiayaan.

## 2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi manajemen bank dalam mengelola resiko perusahaan untuk mengharapkan keuntungan yang ingin dicapai terutama untuk pemberian pembiayaan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan bagi pembaca dan memberikan manfaat bagi penulis lainya yang akan melakukan ataupun akan melanjutkan penelitian lainya.